BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah atau negara dapat diindikasikan melalui seberapa cepat pertumbuhan ekonominya berlangsung (Sultan et al., 2023). Dalam merancang pembangunan, setiap wilayah umumnya menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu aspek terpenting dari kesehatan keseluruhan negara atau sistem ekonomi mana pun (Ivonia Auxiliadora Freitas Marcal et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu sistem ekonomi dalam menghasilkan barang serta menyediakan jasa. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitatif, yang umumnya dinilai melalui indikator seperti produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan per kapita. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu Negara (Widiastuti & Silfiana, 2021). PDB sering dianggap sebagai alat terbaik untuk mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi (Saragih et al., 2021), karena merangkum seluruh kegiatan produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Tujuan penghitungan PDB adalah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ekonomi selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan persentase peningkatan pendapatan nasional riil dalam satu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin tinggi pertumbuhan tersebut, semakin cepat pula peningkatan output suatu wilayah, yang pada akhirnya memperkuat potensi kemajuan wilayah

tersebut. Di Provinsi Jawa Timur, PDB yang dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi perekonomian Jawa Timur, pada bagian berikut disajikan grafik pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur. Grafik ini dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, sehingga mampu menunjukkan perkembangan ekonomi riil dari tahun ke tahun.

Gambar 1. 1 Grafik PDRB atas Harga Konstan Jawa Timur 2018-2024

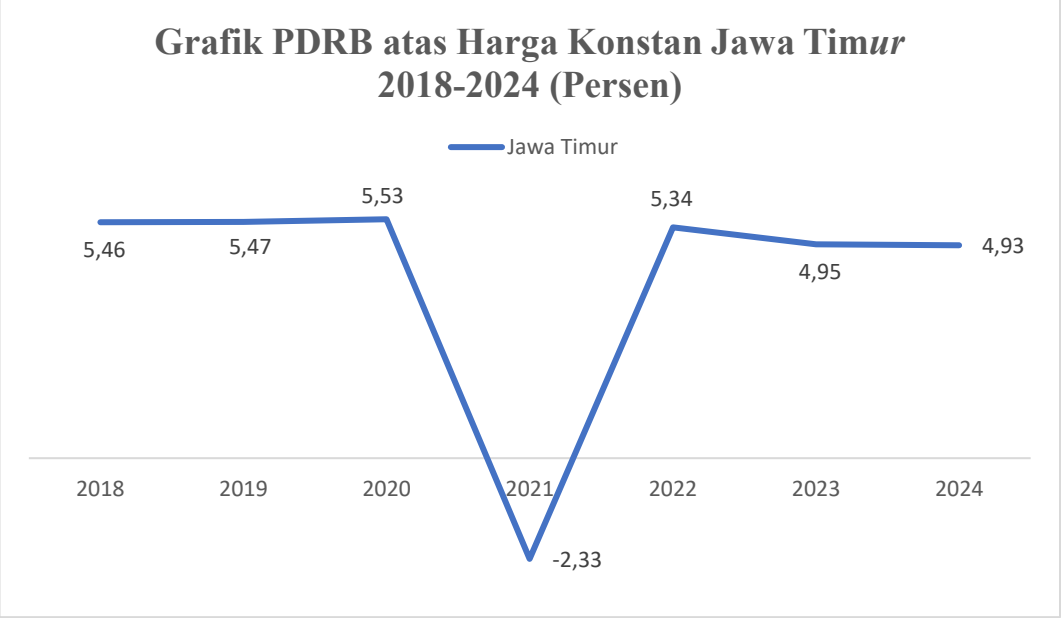

Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah, 2025

Grafik yang disajikan diatas merupakan grafik pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Penggunaan PDRB harga konstan dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan laju peningkatan atau penurunan output perekonomian Jawa Timur secara lebih akurat, serta mencerminkan dinamika perkembangan aktivitas ekonomi daerah dalam periode penelitian.

Grafik tersebut menggambarkan perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2024 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang diolah pada tahun 2025. Secara umum, grafik ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di angka 5,46%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 5,47%. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam hingga mencapai angka negatif sebesar 5,53% yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian regional. Setelah kontraksi besar di tahun 2020, perekonomian Jawa Timur mulai bangkit kembali pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai -2,33% dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,34%. Tren pemulihan ini berlanjut di tahun 2023 dan 2024, masingmasing dengan nilai 4,95% dan 4,93%. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan pola pemulihan ekonomi yang cukup stabil setelah mengalami tekanan berat di tahun 2020, menunjukkan bahwa Jawa Timur mampu mengatasi krisis dan kembali ke jalur pertumbuhan positif. Jawa Timur termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif solid, baik dibandingkan dengan provinsi- provinsi lain maupun jika diukur terhadap rata-rata nasional. Bukti mengenai hal tersebut dapat ditemukan pada data yang dirilis melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Nasional. Grafik di atas menyajikan data mengenai perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan Indonesia selama periode 2018 hingga 2023. Dari visualisasi tersebut, tampak bahwa terjadi penurunan tren pada tahun 2020, yang mencerminkan adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun tersebut. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus membatasi

mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, pariwisata, transportasi, dan jasa, yang merupakan sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi. Jawa Timur dan Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menunjukkan kinerja yang cukup menonjol serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi adalah saling mempengaruhi, di mana kebijakan fiskal dapat menjadi alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel belanja subsidi, pajak, serta pajak PPN memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua kategori utama dalam kebijakan fiskal, yakni kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif biasanya diberlakukan ketika terjadi inflasi yang cukup tinggi, yaitu saat peredaran uang di masyarakat melampaui kebutuhan aktual. Langkah ini dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga aliran uang dari proyek-proyek pemerintah ke masyarakat berkurang. Selain itu, tarif pajak juga dinaikkan untuk mengurangi jumlah uang yang dipegang masyarakat. Tujuannya adalah menekan laju inflasi agar perekonomian kembali stabil. Di sisi lain, kebijakan fiskal ekspansif diberlakukan ketika perekonomian menghadapi masa perlambatan atau kemunduran. Keadaan ini biasanya ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi yang lemah serta meningkatnya angka pengangguran. Sebagai langkah antisipatif, pemerintah cenderung memperbesar belanja negara dan menurunkan beban pajak. Tujuan dari strategi fiskal ini adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat serta mengaktifkan kembali aktivitas ekonomi (Rizal Ma’ruf & Andriansyah, 2022). Langkah-langkah ini biasanya diwujudkan

melalui perubahan alokasi pengeluaran pemerintah serta penyesuaian penerimaan negara, seperti penurunan pajak. Jawa Timur, implementasi kebijakan fiskal ekspansif terlihat jelas pada periode pandemi COVID-19. Saat itu, perekonomian Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 1.611.392,6 Miliar pada tahun 2020. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah meningkatkan belanja publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, berbagai insentif pajak diberikan, seperti pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), guna meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif di Jawa Timur dapat terlihat saat inflasi meningkat tajam akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan 2022. Pemerintah daerah mengambil langkah penghematan anggaran pada beberapa sektor non-prioritas dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pajak daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Dengan penerapan kebijakan fiskal yang tepat, Jawa Timur berhasil mengembalikan laju pertumbuhan ekonominya menjadi 1.757.874,9 Miliar pada tahun 2022, Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, yang merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, dengan fokus pada sektor-sektor strategis dan pemberdayaan masyarakat.Salah satu bentuk nyata kebijakan fiskal di Jawa Timur adalah investasi besar-besaran dalam infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, belanja subsidi juga merupakan salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat serta

mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Subsidi ini membantu menurunkan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Subsidi juga berperan penting dalam mendukung stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Gambar 1. 2 Grafik Belanja Subsidi Provinsi Jawa Timur 2018-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah, 2025

Di Provinsi Jawa Timur, realisasi belanja subsidi Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi tajam dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2018, belanja subsidi mencapai angka tertinggi yaitu Rp185,31 miliar. Namun, setelah itu terjadi penurunan drastis, di mana tahun 2019 hanya mencatat Rp32,05 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp30,28 miliar. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan hanya Rp10,82 miliar, dan meskipun sempat naik kembali ke Rp27,03 miliar pada 2022, angka tersebut kembali turun menjadi Rp22,62 miliar pada 2023. Pada tahun 2024, realisasi belanja subsidi di Provinsi Jawa Timur

mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Nilainya mencapai 63,47 miliar, naik cukup tajam dari realisasi tahun 2023 yang hanya sebesar 22,62 miliar. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan fiskal kepada sektor-sektor strategis, terutama untuk meringankan beban masyarakat pasca pandemi dan menjaga daya beli. Selain itu, lonjakan belanja subsidi ini juga bisa dikaitkan dengan program-program perlindungan sosial, bantuan transportasi, subsidi pertanian, dan upaya stabilisasi harga barang pokok di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Peningkatan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah mulai mengoptimalkan instrumen belanja subsidi sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan kemungkinan adanya pergeseran prioritas kebijakan belanja atau efisiensi dalam alokasi subsidi, terutama dalam merespons situasi pandemi dan pascapandemi.

Aspek penting dalam pengeluaran pemerintah meliputi dalam belanja subsidi adalah sektor pendidikan, serta sektor kesehatan (Carolina, 2022). Salah satu bentuk belanja subsidi yang paling dirasakan manfaatnya adalah program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Program ini dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan, khususnya bagi siswa di tingkat dasar dan menengah. BOSDA di Jawa Timur melengkapi program nasional seperti BOS, sehingga memberikan akses pendidikan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah di wilayah pedesaan. Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas

dalam belanja subsidi Provinsi Jawa Timur.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), yang bertujuan melengkapi cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi salah satu bentuk subsidi yang sangat bermanfaat. Subsidi kesehatan ini memberikan akses layanan kesehatan dasar hingga tingkat lanjut bagi masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini memastikan bahwa masyarakat tidak terbebani oleh biaya kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

Fenomena yang mencolok dari belanja subsidi di Jawa Timur adalah peningkatan alokasi untuk proyek infrastruktur prioritas yang bersifat inklusif. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan subsidi, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti potensi inefisiensi dalam distribusi subsidi dan risiko beban anggaran yang meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan yang cermat dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa belanja subsidi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Dengan pengelolaan yang tepat, belanja subsidi di Jawa Timur diharapkan dapat terus menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi.

Di sisi lain, pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah seperti pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain yang sah. Pajak termasuk salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang memiliki dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan

ekonomi (Nawawi & Irawan, 2010). PAD dianggap sebagai variabel kritis yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Pajak di daerah Jawa Timur memegang peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, penerimaan pajak di Jawa Timur menjadi sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur memegang peranan vital dalam mendukung keberlangsungan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik di provinsi ini. Sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penerimaan pajak di Jawa Timur menjadi tulang punggung bagi pendanaan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 1. 3 Grafik Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik data diolah, 2025

Data realisasi pajak daerah menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, meskipun sempat terdampak pandemi. Pada tahun 2018, pajak daerah yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp24.425,32 miliar, dan mengalami peningkatan menjadi Rp25.484,48 miliar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp23.263,32 miliar, yang dapat dikaitkan langsung dengan pelemahan aktivitas ekonomi akibat pandemi. Setelah itu, tren kembali membaik dengan realisasi sebesar Rp25.257,95 miliar pada 2021, meningkat lagi menjadi Rp28.999,81 miliar di tahun 2022, dan mencapai Rp30.771,16 miliar pada 2023. Pada tahun 2024, realisasi pajak daerah di Provinsi Jawa Timur mencapai 32.337,60 miliar rupiah, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 30.771,16 miliar rupiah. Kenaikan ini menunjukkan penguatan kinerja penerimaan daerah yang mencerminkan perbaikan aktivitas ekonomi dan efektivitas administrasi

perpajakan.

Peningkatan pendapatan pajak ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pulihnya sektor perdagangan, industri, dan jasa, serta meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, adanya digitalisasi layanan perpajakan dan inovasi kebijakan fiskal di tingkat daerah turut mendorong optimalisasi pendapatan pajak pada tahun tersebut. Hal ini menjadi indikasi positif dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur. Kinerja ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Beberapa jenis pajak daerah yang menjadi kontributor utama PAD di Jawa Timur antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi umum, yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Jawa Timur. Hasil dari pajak ini digunakan untuk mendanai program-program sosial, seperti perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, salah satunya melalui digitalisasi layanan perpajakan. Program seperti e-Samsat, e-PBB, dan aplikasi pembayaran online memungkinkan masyarakat membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wajib pajak,

tetapi juga memperluas basis penerimaan pajak secara efektif. Dalam kerangka pembangunan daerah, pajak daerah di Jawa Timur tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pajak menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam membangun Jawa Timur yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Selain itu, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diberlakukan sejak April 2022 memberikan dampak nyata terhadap perekonomian di Jawa Timur. Salah satu fenomena yang muncul adalah melemahnya daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Kenaikan harga barang dan jasa yang dikenai PPN menyebabkan masyarakat mengurangi konsumsi, terutama pada barang-barang sekunder seperti pakaian, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Di pasar-pasar tradisional di Surabaya, Malang, dan Sidoarjo misalnya, terjadi penurunan transaksi barang konsumsi non- pokok. Selain itu, data BPS menunjukkan adanya peningkatan inflasi pascakenaikan PPN, terutama pada kelompok makanan dan minuman olahan, transportasi, dan pakaian. Kenaikan harga ini juga menjadi beban tambahan bagi pelaku UMKM di Jawa Timur, karena harga bahan baku dan jasa pendukung usaha turut meningkat. Pelaku usaha makanan dan minuman di daerah seperti Batu dan Banyuwangi mengeluhkan menyempitnya margin keuntungan akibat harga kemasan dan bahan pokok yang ikut naik. Akibatnya, sebagian masyarakat mulai mengalihkan belanja ke produk yang tidak dikenai PPN seperti bahan pangan pokok, atau berbelanja

di sektor informal. Di daerah pedesaan seperti Jember dan Bojonegoro, warga bahkan lebih memilih berbelanja langsung ke petani atau pasar tradisional untuk menghindari tambahan biaya akibat PPN. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kenaikan PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara, dampaknya terhadap konsumsi dan inflasi perlu diantisipasi dengan kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan belanja subsidi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur?
3. Apakah penerimaan pajak PPN berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh belanja subsidi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak PPN terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan atau landasan bagi penelitian lain di masa mendatang yang mengangkat topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

   Studi ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan di sektor makroekonomi.

3. Manfaat bagi penulis

   Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pengetahuan ilmiah penulis di bidang yang ditekuni, sekaligus menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari selama masa studi. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya informasi mengenai topik makroekonomi di Indonesia.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode analisis regresi data panel. Dalam studi ini, data sekunder yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Variabel yang dianalisis mencakup belanja subsidi, pajak, serta pajak PPN sebagai variabel independen, sedangkan pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependen. Seluruh variabel tersebut berperan sebagai indikator untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan analisis regresi linier berganda.